



# CASCEDING ANGGARAN

Sekretariat Daerah Kota Kendari, 2022

Penjabaran Sasaran Strategis, Indikator  
Kinerja Utama (IKU), dan Target IKU  
Selama Tahun Anggaran 2022

Cascading Setda 2022





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Sekretariat Daerah Kota Kendari Dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading Sekretariat daerah Kota Kendari Tahun 2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantive Laporan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kota Kendari merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Kendari, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi Pemerintah Kota Kendari.

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

**Dr.Drs. RIDWANSYAH TARIDALA, M.S**

Pembina Utama Madya, Gol.IV/d  
NIP. 19681228 198810 1 002



	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b>	
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
 BAB. I PENDAHULUAN .....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum .....	2
1.4 Ruang Lingkup .....	4
 BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	 6
2.1 Rencana Strategis .....	6
2.2 Visi dan Misi.....	8
2.3 Tujuan, Sasaran dan IKU .....	12
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan .....	15
2.5 Cascading Kinerja .....	24
 BAB. III PENUTUP .....	 25
 LAMPIRAN	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

*Good governance* (kepemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat di terima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dana akuntabilitas untuk menuju “good governance” adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan



anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai, hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah:

- (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.2. Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 16 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang penentuannya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kendari, disebutkan bahwa tugas pokok Sekretaris Daerah Kota Kendari adalah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap





pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Daerah menyelenggarakan Sub Tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Daerah serta Visi dan Misi Walikota.
- b. Mengoordinasikan perumusan sasaran, strategi dan program kerja Daerah berdasarkan kebijakan Daerah;
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan penganggaran, pengelolaan, pelayanan, pengendalian dan pelaporan dalam lingkup:
  1. Urusan Pemerintahan Daerah;
  2. Keuangan Daerah;
  3. Barang Milik Daerah;
  4. Pemerintahan Umum;
  5. Pembangunan Daerah; dan
  6. Fungsi Pemerintahan Daerah lainnya.
- d. Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sebagai bahan pertimbangan Kebijakan Walikota dan penyempurnaan kebijakan Daerah yang telah ditetapkan
- e. Mendistribusikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Staf Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah (OPD) melalui rapat-rapat Interen dan atau petunjuk langsung untuk



keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Membina para Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta staf dan para pegawai sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier aparatur Pemerintah Daerah;
- g. Mengkonsultasikan dan mengoordinasikan tugas dengan instansi/lembaga terkait, baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- i. Mengendalikan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Mengendalikan upaya peningkatan standar mutu pelayanan Pemerintah Daerah;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada Walikota;
- l. Menyelenggarakan Kebijakan Umum Daerah dalam bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan serta pelayanan Administrasi;
- m. Menyelenggarakan perumusan sasaran strategis dan program kerja Sekretariat Daerah yang meliputi Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan serta pelayanan Administrasi;
- n. Mendistribusikan tugas, mengawasi dan mengendalikan staf pada Sekretariat Daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

Sekretariat Daerah Kota Kendari terdiri dari:

- a. 1 (Satu) orang Sekretaris Daerah
- b. 3 (Tiga) orang Staf Ahli
- c. 3 (Tiga) orang Asisten Sekretaris Daerah



d. 12 (Dua Belas) orang Kepala Bagian

e. 36 (Tiga Puluh Enam) orang Kepala Sub Bagian

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kendari sebagai berikut ;

I. Sekretaris Daerah;

II. Asisten-asisten;

A. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, membawahi 4 (Empat) Bagian, terdiri atas;

1. Bagian Tata Pemerintahan.
2. Bagian Hukum.
3. Bagian Sumber Daya Alam.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

B. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 4 (Empat) Bagian, terdiri atas;

1. Bagian Perekonomian .
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Bagian Administrasi Pembangunan.
4. Bagian Kerjasama Daerah.

C. Asisten Administrasi Umum, membawahi 4 (Empat) Bagian yang terdiri atas;

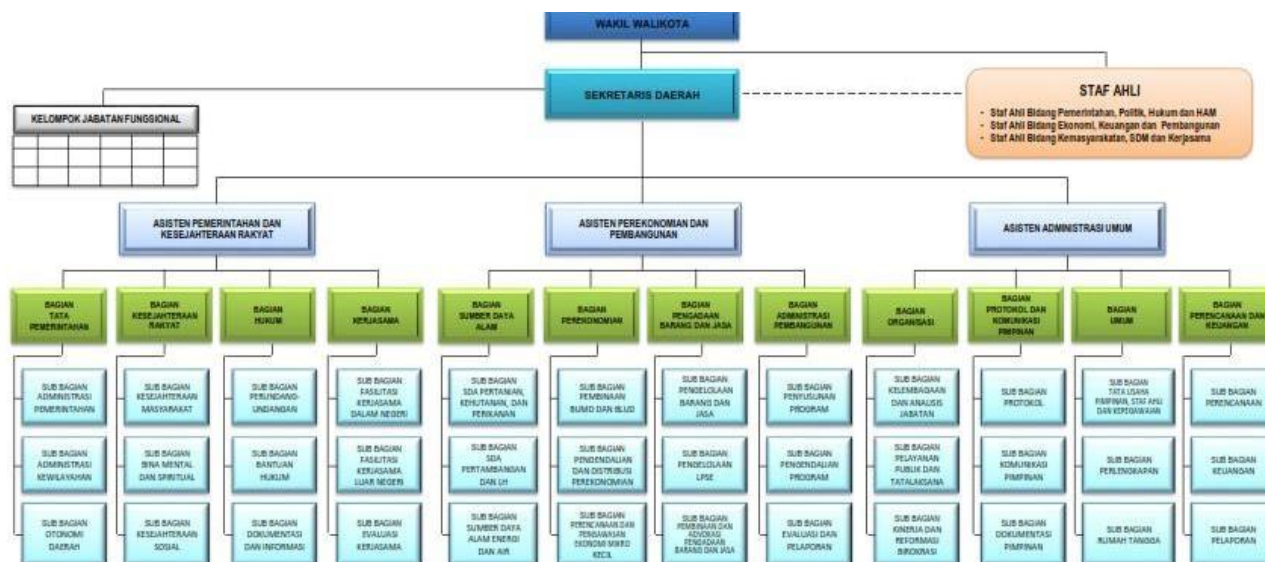
1. Bagian Organisasi .
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
3. Bagian Umum.
4. Bagian Perencanaan Dan Keuangan.

D. Jabatan Fungsional.





**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kendari**



### 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Laporan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kota Kendari Tahun 2022 adalah:

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kendari Tahun 2022.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perencanaan yang tercantum dalam RPJMD Kota Kendari Tahun 2017-2022 dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kota Kendari Tahun 2022, terdiri dari:

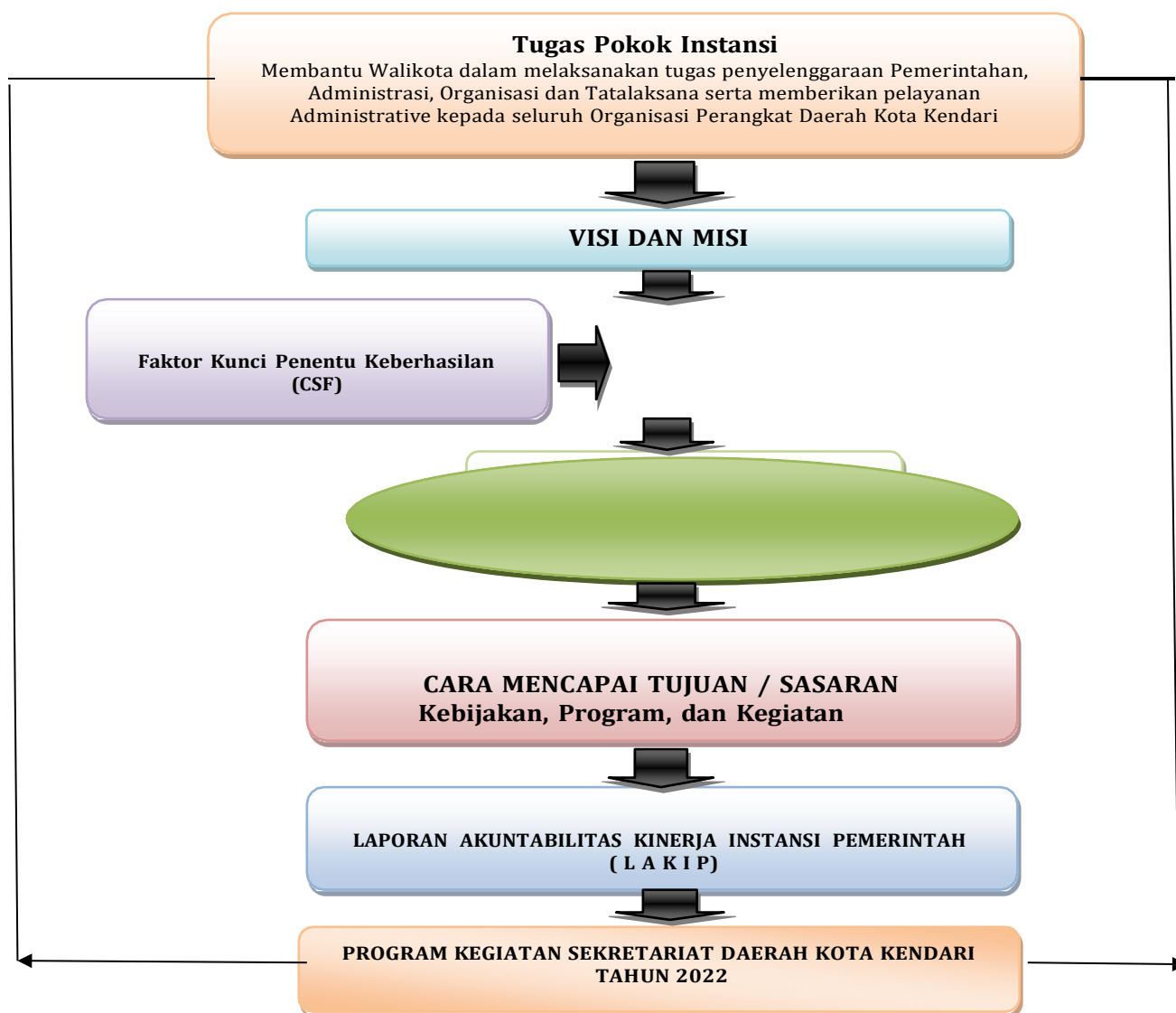
- BAB I. Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Gambaran Umum, dan Ruang Lingkup
- BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat Informasi tentang Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja)
- BAB III. Penutup



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Mengingat perencanaan strategis merupakan suatu proses secara sistematis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, maka sebelum dirumuskan visi dan misi perlu dibuatkan kerangka berpikir sehingga tersusunlah suatu alur pikir yang akan membantu menyusun rencana strategis yang baik, sebagai berikut :





Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Walikota.

RENSTRA Setda Kota Kendari Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah. RENSTRA Setda Kota Kendari secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan Daerah.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 telah ditetapkan dalam peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017-2022, Perda Kota Kendari Nomor 64 Tahun 2020 Tentang APBD Kota Kendari dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor : 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022, dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Kendari dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor 14/KB/2022 dan 170/337/DPRD/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Kendari dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor 15/KB/2022 dan 170/336/DPRD/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat ( *Community development* ) sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Berdasarkan hal ini maka untuk mengukur tingkat capaian pembangunan tersebut diperlukan visi dan misi. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka Visi dan misi adalah merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Pemerintah Kota Kendari.

## **B. VISI**

### **1. Pernyataan Visi**

Berdasarkan Visi Kota Kendari adalah “ MEWUJUDKAN KOTA KENDARI SEBAGAI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, TEKNOLOGI, DAN INFORMASI “.

Adapun Visi Kota Kendari, dapat di jabarkan sebagai berikut :

**Kota layak Huni** adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman selamat dan damai dalam suatu Kota, serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat Kota dengan sistem Ekologi.

**Berbasis Ekologi** adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari, dengan menciptakan Kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan



perdagangan/jasa dan kawasan pemukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana dan dampak perubahan iklim, serta melestarikan kawasan posisir dengan tetap memperhatikan daya dukung Kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman yang ramah lingkungan.

**Informasi dan Teknologi** menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai Kota yang menerapkan teknologi informasi di dalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi, agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (E-Government) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

## **2. Makna Visi**

Yang dimaksud dengan institusi yang berkualitas dari pernyataan visi tersebut diatas adalah penguatan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan didukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional untuk mencapai Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

## **C. MISI**

### **1. Pernyataan Misi**

Berdasarkan visi tersebut maka misi yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kota Kendari adalah :

1. Menciptakan tatanan organisasi pemerintahan yang bersih, demokratis, berwibawa, dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur.
3. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat kota yang agamis, aman, rukun, dan damai.



4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka pertumbuhan perekonomian Daerah.

## **2. Makna Misi**

Adapun makna misi yang terkandung dalam pernyataan misi tersebut adalah :

1. Menciptakan tatanan organisasi pemerintahan yang bersih, demokratis, berwibawa, dan bertanggung jawab mengandung makna : meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik yang adil dan merata.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur mengandung makna : meningkatkan kemampuan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta prosedur, mekanisme dan hubungan kerja yang harmonis antara unit organisasi. Disamping itu meningkatnya profesionalisme aparatur yang mampu menguasai teori (konsep) dan mampu menerapkan teori (konsep), sehingga aparatur pemerintah dapat mengembangkan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat;
3. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat kota yang agamis, aman, rukun, dan damai mengandung makna : terciptanya suatu kondisi kehidupan dan sikap masyarakat yang senantiasa saling toleransi dan gotong royong antara umat beragama.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka pertumbuhan perekonomian Daerah mengandung makna : terciptanya iklim yang kondusif bagi semua pelaku ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.





## **D. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**

Dalam rangka menetapkan kebijakan operasional untuk menciptakan visi dan misi tersebut maka perlu dilakukan SWOT (Straight, Weakness, Oportunity, Threat) dengan melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Adapun makna SWOT tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

### **a. Faktor Internal**

#### **1. Kekuatan (Straight)**

- Adanya visi dan misi organisasi
- Adanya uraian dan tugas dan fungsi yang jelas
- Adanya kemauan aparat untuk meningkatkan kinerjanya
- Adanya kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tupoksinya
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

#### **2. Kelemahan (Weakness)**

- Adanya tugas pokok dan fungsinya yang masih tumpang tindih antara unit organisasi dan antara bagian
- Minimnya kegiatan pelatihan teknis fungsional bagi aparat non eselon
- Rendahnya kinerja aparatur pemerintah dalam menyelesaikan tugas-tugas rutin organisasi

### **b. Faktor Eksternal**

#### **1. Peluang (Oportunity)**

- Adanya koordinasi yang baik dengan lembaga terkait
- Adanya dukungan dari pimpinan pemerintahan daerah
- Adanya mekanisme pengawasan yang terpadu dari lembaga terkait dan masyarakat
- Adanya peraturan-peraturan dan petunjuk yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

#### **2. Ancaman (Threat)**

- Terjadinya friksi dan benturan antara unit organisasi yang



disebabkan tumpang tindihnya tupoksi

- Kurangnya pemahaman unit organisasi lain dan masyarakat tentang kedudukan dan peranan Sekretaris Daerah

Berdasarkan faktor lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas, maka analisis dilakukan terhadap kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman, dengan strategi menggabungkan analisis kekuatan dan peluang. Kelemahan dan peluang, kekuatan dengan ancaman, dan kelemahan dengan ancaman untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul sehingga didapat strategi untuk mencapai keberhasilan sebagai berikut :

- a. Terciptanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas untuk memudahkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang baik (S + D)
- b. Meningkatnya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis dan fungsional untuk meningkatkan kinerja aparatur (D + W)
- c. Tersusunnya visi dan misi masing-masing unit kerja serta tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk mengatasi terjadinya tarik menarik kewenangan (Friksi) antara unit kerja lainnya (S + I)
- d. Mengadakan sosialisasi tentang kedudukan peranan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan Daerah dan peraturan Walikota untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam meningkatkan kinerjanya (I + W)

## **E. TUJUAN DAN SASARAN.**

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Untuk memberikan fokus pada pencapaian misi yang diemban maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Kendari Tahun 2022**

<b>Tujuan 1</b>	<b>Meningkatnya Pelaksanaan Prinsip-Prinsip pemerintahan yang baik</b>		
	<b>Sasaran</b>	1.1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah
		1.2	Meningkatnya integrasi moral dan profesionalisme aparat penegak hukum.
		1.3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja.
		1.4	Terselenggaranya sistem administrasi perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.
		1.5	Terselenggaranya sistem informasi yang transparan dan akuntabel
		1.6	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Perda.
<b>Tujuan 2</b>	<b>Meningkatnya Penguatan Kelembagaan, kualitas sumberdaya aparatur, pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah daerah.</b>		
	<b>Sasaran</b>	2.1	Terbentuknya organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien
		2.2	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang profesional, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas.
		2.3	Meningkatnya kwalitas dan kwanntitas sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.
<b>Tujuan 3</b>	<b>Meningkatkan Ketentraman masyarakat, sikap dan perilaku yang harmonis</b>		
	<b>Sasaran</b>	3.1	Meningkatkan pembinaan keagamaan dan hubungan komunikasi yang harmonis antar umat beragama.
		3.2	Meningkatnya sarana dan prasaran yang mendukung terciptanya keindahan dan rasa aman.
<b>Tujuan 4</b>	<b>Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pelaku ekonomi dalam rangka meningkatkan produktifitas, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.</b>		
	<b>Sasaran</b>	4.1	Meningkatnya koordinasi pada lembaga usaha dan konsumen.
		4.2	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Kendari yang secara langsung menunjukkan Indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun (2017-2022) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kendari dilihat pada tabel sebagai berikut



:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Kendari sesuai**  
**Renstra Sekretariat Daerah Kota Kendari 2017 - 2022**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN RENSTRA					PROYEKSI		CAPAIAN REALISASI			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,30%	95,37%	88,25%	93,78%
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	43%	18%	15%	13%	12%	75%	15%	15%	95,49%	75,21%	59%	89,05%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	73,40%	99,57%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	00%	100%	100%	100%	100%	89,91%	99,34%	90,46%	99,98%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,67%	99,06%	94,13%	99,62%
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Protokol pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,41%	90,64%	87,82%	85%
7	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,87%	86,87%	72,99%	99,58%
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Program pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,75%	99,63%	96,39%	98,95%
9	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terwujudnya layanan pengadaan secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,77%	92,26%	93,20%	99,86%
10	Program Pembinaan dan Pengawasan	Terlaksananya pengawasan terhadap usaha pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
	Bidang Pertambangan													



No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN RENSTRA					PROYEKSI		CAPAIAN REALISASI			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2017	2018	2019	2020
11	Program Pengawasan dan penertiban Penggunaan Air Bawah Tanah	Terlaksananya Pengawasan dan penertiban Penggunaan Air Bawah Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan kelistrikan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	99,67%
13	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energy Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energy Sumber Daya Mineral	-	100%	100%	100%	-	50%	-	-	-	-	33,22%	-
14	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,15%	93,63%	90,66%	99,89%
15	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan Prosedur pengawasan	Terwujudnya Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan Prosedur pengawasan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
16	Program Penataan Penguasaan Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terwujudnya Penataan Penguasaan Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
17	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,03%	98,43%	76,71%	100%
18	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya Program Penataan Daerah Otonomi dan Wilayah Kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
19	Program Penataan daerah Otonomi dan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya Program Penataan Daerah Otonomi dan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
20	Program mengintensifkan Penanganan dan Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Penanganan dan Pengaduan Masyarakat	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Program Penataan Perundang-undangan	Terwujudnya Program Penataan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,21%	99,37%	87,13%	80,43%
22	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,91%	90,41%	-	-
23	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Terwujudnya pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-



No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN RENSTRA					PROYEKSI		CAPAIAN REALISASI			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2017	2018	2019	2020
24	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Terwujudnya kerukunan umat beragama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,95%	98,404%	85,68%	96,16%
25	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,92%	96,62%	99,95%	99,94%
26	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Masyarakat	Terwujudnya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Masyarakat	100%	100%	100%	-	100%	80%	80%	80%	-	-	-	-
27	Program Pelayanan Teknologi Informasi Aplikasi Telematika	Terwujudnya Pelayanan Teknologi Informasi Aplikasi Telematika	100%	100%	100%	-	-	65%	-	-	-	-	-	-
28	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	93,47%	100%	-
29	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
30	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,64%	99,88%	-
31	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan	Terciptanya Lembaga Ekonomi Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,51%	98,53%	-
32	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kapasitas SDM Pengurus PKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,09%	91,13%	99,51%
33	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,77%	-

## 2. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Meskipun tujuan dan sasaran telah ditetapkan namun masih perlu ditentukan bagaimana tujuan dan sasaran tersebut dapat diwujudkan. Untuk itu perlu dilakukan langkah selanjutnya sebagai berikut :

### 1. Menetapkan kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan





yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Menyusun strategi dan program-program yang mendukung pencapaian Visi dan Misi.

### **3. Kebijakan**

Kebijakan yaitu pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan harus disusun berdasarkan pandangan pimpinan unit organisasi yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dalam Instansi merupakan kumpulan keputusan-keputusan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- d. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui pemberian insentif, lembur dan lain-lain
- e. Penerapan Pelayanan bersistem informasi yang akurat.

### **4. Program**

Program adalah penjabaran kebijakan pemerintah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi Pemerintah.

Untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan, harus ditindak lanjuti dengan penyusunan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
10. Penataan Organisasi
11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
12. Administrasi Tata Pemerintahan.
13. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
14. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
15. Fasilitasi Kerjasama Daerah
16. Fasilitasi Kebijakan Perekonomian
17. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
18. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
19. Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam

#### **F. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran, melalui kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kota Kendari merupakan akumulasi RKT dari masing-masing bagian yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, dengan melakukan pengidentifikasian dari sasaran mana yang akan



diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana capaiannya (targetnya).

2. Program yang ditetapkan dan berada pada lingkup sasaran tertentu, dimana program yang dimaksud adalah program-program yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
3. Kegiatan, merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit kerja tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas pokok, dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan Indikator Kinerja dan rencana capaiannya.

Indikator kinerja dimaksud dalam komponen kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan, meliputi :

- Input, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan output.
- Output, yaitu segala sesuatu berupa produk / jasa fisik dan / atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- Outcome, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Penetapan Indikator Kinerja kegiatan didasarkan pada pikiran yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data dukungan. Adapun hasil identifikasi sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Kendari Tahun 2022.

#### **G. INDIKATOR KINERJA UTAMA.**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan Tata Pemerintahan yang baik, maka di terbitkannya



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi pemerintah.

Sekretariat Daerah Kota Kendari telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kendari dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas.

Pemerintah Kota Kendari, juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat pemerintah Daerah maupun tingkat satuan kerja perangkat Daerah. Dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan, dan isu- isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Kendari tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Setda
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Setda
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Setda
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KETERANGAN
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setda
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda
8.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda
9.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Setda
10.	Penataan Organisasi	Tertatahnya Organisasi	Setda
11.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksanannya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Setda
12.	Administrasi Tata Pemerintahan	Tersusunnya Administrasi Tata Pemerintahan	Setda
13.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksanannya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda
14.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Hukum	Setda
15.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	Setda
16.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksanannya Kebijakan Perekonomian	Setda
17.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksanannya Administrasi Pembangunan.	Setda
18.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolahnya Pengadaan Barang dan Jasa	Setda
19.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terpantaunya Kebijakan Sumber Daya Alam	Setda

## H. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu



tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja harus memperhatikan RPJMD, Renstra OPD, IKU OPD, dan DPA.

Pejabat Eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah DPA ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian kinerja Eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan dan anggaran. Sedangkan dokumen perjanjian kinerja Eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kota Kendari dapat dilihat pada lampiran Lakip Setda Kota Kendari.



Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Kendari Tahun 2022 adalah sebagai berikut:





**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Kendari Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
8.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%
9.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%
10.	Penataan Organisasi	Tertatahnya Organisasi	100%
11.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%
12.	Administrasi Tata Pemerintahan	Tersusunnya Administrasi Tata Pemerintahan	100%
13.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %
14.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Hukum	100%
15.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	100 %



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
16.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100 %
17.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100%
18.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolahnya Pengadaan Barang dan Jasa	100%
19.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terpantaunya Kebijakan Sumber Daya Alam	100%

**Tabel 2.6**

**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Kendari Tahun 2022**

NO.	SASARAN PROGRAM KINERJA	ANGGARAN (Rp)	Ket.
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.301.401	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.349.132.521	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	343.252.154	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.899.094.954	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.784.455.338	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.417.125.650	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.641.955.713	APBD
8.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	838.005.354	APBD
9.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.430.098.390	APBD
10.	Penataan Organisasi	129.566.990	APBD
11.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	115.963.670	APBD
12.	Administrasi Tata Pemerintahan	639.205.425	APBD
13.	Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan Rakyat	8.569.854.252	APBD
14.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	131.065.890	APBD
15.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	138.031.915	APBD
16.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	151.188.660	APBD
17.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.	32.564.897	APBD
18.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	244.560.154	APBD



NO.	SASARAN PROGRAM KINERJA	ANGGARAN (Rp)	Ket.
19.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.907.475.445	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>53.918.898.773</b>	

## I. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja adalah merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading juga harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (Causability), serta memiliki keterkaitan Sinergitas (Aligment). Untuk mewujudkan target yang ingin dicapai, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan di capai menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV. Adapun Rincian Perjanjian Kinerja atau Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat di lihat pada Lampiran.



### **BAB III PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kota Kendari Tahun 2022, dapat di simpulkan, bahwa penyusunan Cascading Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran Visa dan Misi Kota Kendari , bagi pejabat Eselon yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis, yang di tandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikian laporan Cascading Kinerja ini dibuat semoga bermanfaat, kritikan dan saran yang di sampaikan akan diterima demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

**Kendari, Februari 2023**

**Sekretaris Daerah** *h.*  
**Kota Kendari**

**Dr. Drs. RIDWANSYAH TARIDALA, M.Si**  
**Pembina Utama Madya Gol. IV/d**  
**NIP. 19681228 198810 1 002**



# **LAMPIRAN CASCEDING ANGGARAN SETDA 2022**



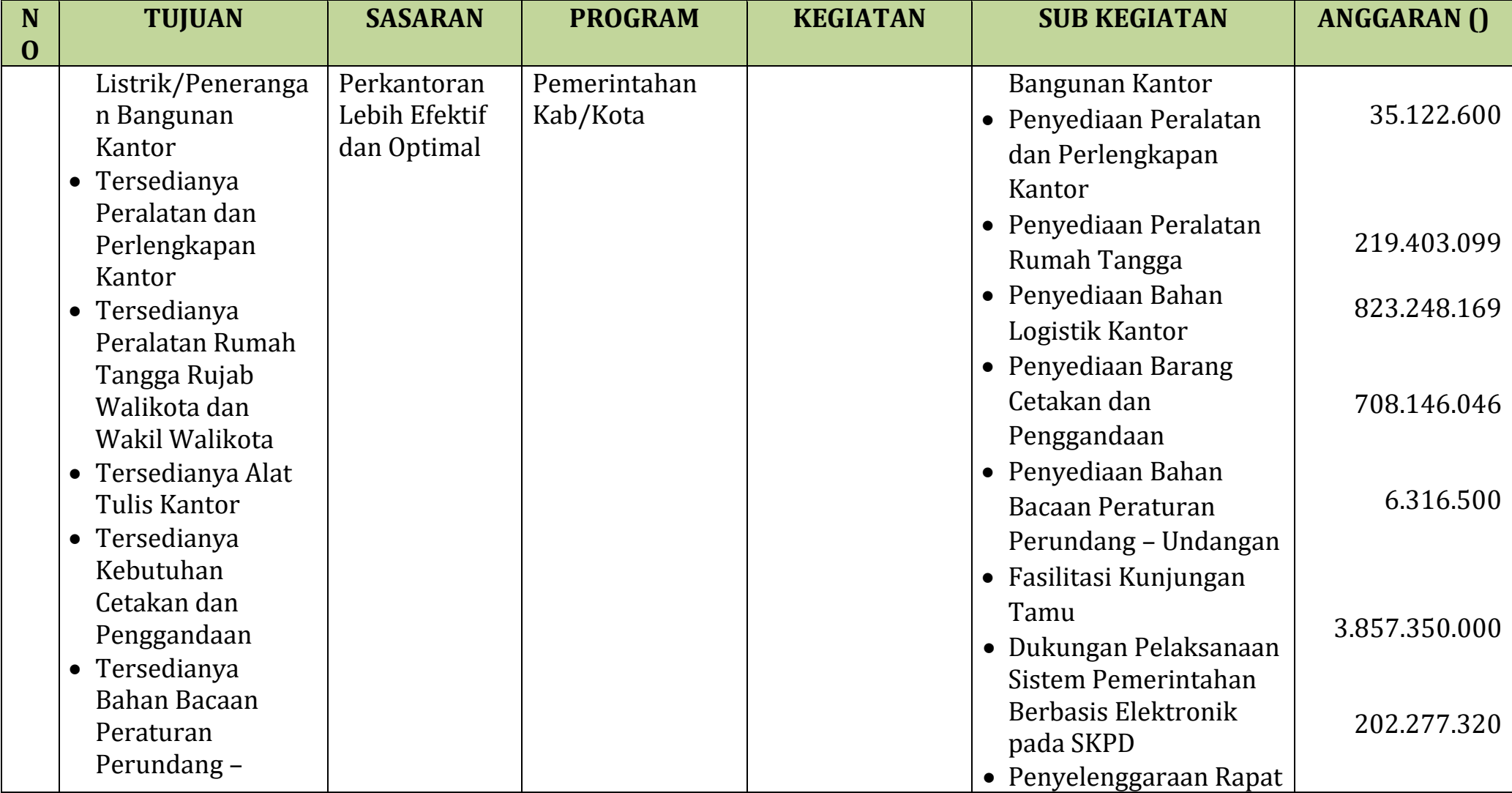
## CASCEDING SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

N O	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Renja Sekretariat</li> <li>• Tersedianya Dokumen RKA</li> <li>• Tersedianya LAKIP Sekretariat</li> </ul>	Terwujudnya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah yang optimal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul>	17.762.790  38.571.069  99.967.542
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>• Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi</li> </ul>	Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang optimal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi</li> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> </ul>	14.726.307.731  106.990.380  49.675.510





N O	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN ( )
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>• Tersedianya Laporan Keuangan</li> </ul>				SKPD  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD</li> </ul>	466.158.900
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pegawai</li> <li>• Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur</li> </ul>	Peningkatan Kualitas Disiplin Sumber Daya Aparatur Lebih Efektif dan Optimal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsi</li> </ul>	118.988.154  178.568.000  45.696.000
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Komponen Instalasi</li> </ul>	Peningkatan Pelayanan Administrasi	Program Penunjang Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</li> </ul>	101.072.220







N O	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Laptop • Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Tersedianya Sarana Pendukung Gedung Kantor Kecamatan/Kelurahan				dan Mesin Lainnya • Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.043.524.501  210.445.000  308.212.661
6	• Tersedianya Jasa Surat Menyurat • Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Terbayarnya Jasa	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  • Penyediaan Jasa	908.331.400  1.037.522.250  593.472.000



N O	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Pelayanan Umum Kantor				Pelayanan Umum Kantor	877.800.000
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>• Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> </ul>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Lebih Optimal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</li> </ul>	<p>1.961.171.423</p> <p>572.633.136</p> <p>61.360.119</p>







N O	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	dan Peralatan Rumah Tangga Rujab Wakil Walikota					
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Dokumen Tupoksi OPD, Analisis Beban Kerja OPD, Standar Kompetensi Jabatan OPD, Reposisi dan Restrukturisasi Kelembagaan, Rancangan Perda Pembentukan OPD, Profil Kelembagaan Perangkat Daerah, Evaluasi Jabatan.</li> <li>Tersedianya Dokumen SOP,</li> </ul>	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Lebih Optimal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Penataan Organisasi	• Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	70.404.500
					• Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.519.480
					• Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	28.643.010
					• Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					• Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	





N O	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, Pedoman Tata Naskah Dinas, Perwali Pakaian Dinas, Jam Kerja, Metode Kerja, Prosedur Kerja dan Pola Hubungan Kerja • Tersedianya Dokumen Evaluasi Reformasi Birokrasi, Dokumen Road Map					
11	• Terwujudnya Pelayanan Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi	Peningkatan Cakupan Kualitas Pelayanan Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	• Fasilitas Keprotokolan  • Fasilitas Komunikasi Pimpinan	30.774.950  34.969.820



N O	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Pimpinan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Pengaturan Kegiatan Pimpinan dan Pengelolaan</li> <li>• Terlaksananya Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan</li> </ul>	Daerah Kepada Kepala Daerah dan Insitasi Terkait Lainnya			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendokumentasian Tugas Pimpinan</li> </ul>	50.218.900
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Kegiatan APEKSI dan Penataan Administrasi</li> <li>• Terlaksananya Lomba Kelurahan dan Penataan Kewilayahan</li> <li>• Terlaksananya Kegiatan TTG dan Kebijakan Otoda</li> </ul>	Peningkatan Pelaksanaan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Lebih Optimal	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</li> <li>• Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</li> </ul>	430.085.570  94.503.700  114.616.155





NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	DiFasilitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi</li> </ul>	Dihasilkan Sesuai dengan Kebutuhan			Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	57.102.500
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya Pelayanan Fasilitas Kerjasama Daerah</li> <li>Terwujudnya Fasilitas Kerjasama Luar Negeri</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	Pembuatan Dokumen Kerjasama Pemerintah Daerah Lebih Optima	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitas Kerjasama Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri</li> <li>Fasilitas Kerjasama Luar Negeri</li> <li>Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama</li> </ul>	49.998.655 88.033.260
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD dan BLUD</li> <li>Monitoring dan Evaluasi, Tersedianya</li> </ul>	Peningkatan Pengelolaan Kebijakan di Bidang Perekonomian Lebih Optimal	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</li> <li>Pengendalian dan Distribusi</li> </ul>	123.588.920 27.599.740



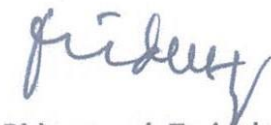
N O	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN ()
	Laporan TPID dan Operasional TPID <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan Data Teadu Perekonomian</li> <li>• Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pendirian BUMD (PERUMDA)</li> </ul>				Perekonomian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</li> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD</li> </ul>	
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</li> </ul>	Peningkatan Capaian Laporan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</li> </ul>	32.564.897
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Pengelolaan</li> </ul>	Peningkatan Pengembanga	Program Perekonomian	Pengelolaan Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pengadaan Barang dan</li> </ul>	96.446.632



N O	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</li> <li>• Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ</li> </ul>	n Pengelolaan Keuangan Daerah Dibidang Pengadaan Barang dan Jasa	dan Pembangunan	Barang dan Jasa	Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</li> <li>• Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	85.056.014  63.057.508
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Dokumen yang Dihasilkan</li> <li>• Jumlah Dokumen yang dihasilkan</li> <li>• Jumlah Dokumen yang dihasilkan, Tersedianya Jasa Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum serta tersedianya Lampu</li> </ul>	Peningkatan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan di Bidang Sumber Daya Alam	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan</li> </ul>	37.500.000  32.700.000  1.837.275.445

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN ( )
	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum serta tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum				dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1.837.275.445

Kendari, 7 Februari 2023  
 Sekretaris Daerah Kota Kendari,



**Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si**  
 Pembina Utama Muda/IV.c  
 Nip.19681228 19881010 02